

Adaptasi Masyarakat Transmigrasi Pada Masa Konflik Aceh (Studi Kasus Di Desa Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah)

Nurlaeli Rohmah¹, Rakhmadsyah Putra Rangkuty², Dini Rizki³

^{1, 2, 3} Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Corresponding Author : rakhmadsyah@unimal.ac.id

ABSTRAK

Transmigrasi merupakan program dari pemerintah yang memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang masih sedikit atau belum ada penduduknya. Pada saat masyarakat transmigrasi baru beberapa tahun tinggal di desa tersebut, muncullah gejolak konflik antara kelompok GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat transmigrasi dalam beradaptasi di wilayah transmigrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Adaptasi dari Usman Pelly dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat transmigrasi di Desa Merah Mege memiliki apa yang disebut dengan misi budaya yang membuat mereka tetap bertahan di daerah yang sedang mengalami konflik, dan dalam beradaptasi pada masa konflik Aceh, masyarakat melakukan strategi adaptasi sebagai berikut: melakukan penjagaan bersama pada malam hari, kepemilikan senjata tajam dan rakitan, merubah aktivitas harian masyarakat transmigrasi, serta berkumpul dalam satu rumah yang sama untuk setiap lima keluarga. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat transmigrasi adalah perasaan takut dan khawatir saat berkerja karena takut bertemu dengan GAM, ketakutan akan hukuman dari TNI, ketakutan saat mendengar suara tembakan dan melihat mayat yang dibunuh oleh TNI dan GAM serta terkendalanya masyarakat transmigrasi dalam melakukan pekerjaan berkebun dan kegiatan sehari-hari.

Kata Kunci: *Adaptasi, Masyarakat Transmigrasi, Konflik Aceh*

PENDAHULUAN

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Agenda transmigrasi ini telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang dijadikan sebagai tujuan transmigrasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Wilayah Aceh yang dijadikan oleh pemerintah sebagai tujuan masyarakat transmigrasi untuk meningkatkan kualitas hidup salah satunya adalah wilayah Aceh Tengah, tepatnya di Desa Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

Para transmigran dari pulau Jawa ini masuk ke Desa Merah Mege ini pada tahun 1991. Para transmigran mengaku bahwa mereka bekerja sebagai petani dengan modal awal yang diberikan pemerintah berupa bantuan rumah seluas 6m x 6m, pekarangan rumah 2.500m², lahan usaha 1 (satu) seluas 7.500m², lahan usaha 2 (dua) seluas 10.000m², peralatan pertanian lengkap, peralatan dapur lengkap serta pemberian jatah hidup selama satu tahun yang dibagikan pada setiap bulannya Daerah Aceh pada saat itu masih dalam keadaan berkonflik antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Gerakan yang dipimpin oleh Tgk. Hasan di Tiro ini sudah terjadi sejak tahun 1976 dan baru berakhir pada tahun 2005 (Jayanti: 2010). Konflik yang terjadi di Aceh ini termasuk ke dalam konflik vertikal (*vertical conflict*), yakni konflik yang terjadi antara kelompok dengan negara. Konflik ini terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Aceh dari negara Republik Indonesia.

Masyarakat transmigrasi di daerah Aceh, terutama di Desa Merah Mege yang terletak di Aceh Tengah ini sangat menarik, karena pada saat masyarakat dari pulau Jawa berusaha merubah kehidupannya menjadi lebih layak dan lebih baik lagi, masyarakat tersebut harus ditempatkan di wilayah yang sedang mengalami konflik. Atas dasar itulah perlu diadakan sebuah penelitian yang diharapkan dapat memberikan data yang berkaitan dan juga mampu menggambarkan secara langsung bagaimana Adaptasi Masyarakat Transmigrasi Pada Masa Konflik Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data yang penulis dapatkan di awal hanya bersifat sementara, sehingga penulis perlu lebih mendalami masalah penelitian dengan langsung ikut memahami keadaan orang yang akan di teliti

di lokasi penelitian, yang kemudian data yang telah di dapatkan sebelumnya akan di pilih kembali setelah data terbaru telah dilakukan.

Alasan Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian bentuk deskriptif di karenakan dengan menggunakan penelitian ini maka penulis bisa dapat lebih memahami tentang permasalahan yang terjadi yang tentunya berhubungan langsung dengan masyarakat dan memerlukan perbincangan langsung dengan masyarakat dan memerlukan perbincangan yang lebih mendalam agar penulis lebih mengetahui bagaimana masyarakat transmigrasi di daerah Aceh, terutama di Desa Merah Mege yang terletak di Aceh Tengah ini sangat menarik, karena pada saat masyarakat dari pulau Jawa berusaha merubah kehidupannya menjadi lebih layak dan lebih baik lagi, masyarakat tersebut harus ditempatkan di wilayah yang sedang mengalami konflik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Teori Adaptasi (Usman Pelly)

Dalam bukunya Urbanisasi dan Adaptasi, Usman Pelly menjelaskan bahwa perantau memiliki apa yang disebutnya sebagai “Misi Budaya”. Misi budaya adalah seperangkat tujuan yang diharapkan dicapai oleh anggota-anggota suatu masyarakat tertentu, yang didasarkan pada nilai-nilai dominan dari pandangan dunia masyarakat tersebut (Pelly, 1994:1). Misi budaya inilah yang mendorong masyarakat untuk merantau. Keberhasilan atau kegagalan seorang perantau ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalannya dalam menjalankan misi budaya tersebut (Pelly, 1994:2).

Kelompok perantau memiliki asosiasi sukarela (*voluntary association*) yang memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas etnik dan dalam mengadaptasikan misi budaya kepada tuntutan lingkungan. Asosiasi ini dipakai sebagai mekanisme adaptasi dan alat perjuangan dalam bersaing dengan kelompok etnis lain (Pelly, 1994:2). Misi budaya dan latar budaya serta perubahan dalam masyarakat tuan rumah membawa pengaruh terhadap strategi adaptasi perantau dan struktur sosialnya (Pelly, 1994:4).

Menurut Pelly (1994:15) terdapat dua macam kekuatan terus menerus mempengaruhi keutuhan kelompok etnik di daerah rantau, yakni:

1. Orang-orang di kampung halaman mengharap para perantau menjalankan misi budaya dan mempertahankan identitas etnik mereka.
2. Para perantau harus menyesuaikan diri dengan latar budaya tuan rumah. Para perantau harus mengendalikan hubungan-hubungan dinamik antara *kebertahanan* dan *perubahan* yang mempengaruhi bagaimana mereka beradaptasi.

Adaptasi

Adaptasi dapat diartikan sebagai bentuk penyesuaian seseorang di dalam lingkungan yang baru. Adaptasi ini dilakukan untuk dapat mempertahankan hidupnya. W. A Gerungan menyebutkan bahwa penyesuaian diri adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan (keinginan diri). Mengubah diri dengan keadaan lingkungan sifatnya pasif (*autoplastis*) (Suprianto, 2012). Proses adaptasi menghasilkan keseimbangan yang dinamis antara kebutuhan penduduk dan potensi lingkungannya (Haviland, 1985:5)

1. Penjagaan Bersama Pada Malam Hari

Masyarakat transmigrasi di Desa Merah Mege sudah menyadari pentingnya keamanan jauh sebelum kedatangan GAM di Aceh Tengah, yakni dengan mengadakan penjagaan pada malam hari yang dilakukan secara bergilir setiap minggunya. Setelah adanya konflik di Aceh, masyarakat menambah penjagaan masal, sehingga terdapat dua jenis penjagaan saat konflik Aceh. Penjagaan ini merupakan langkah yang ditempuh masyarakat untuk mengamankan wilayah, harta benda serta masyarakat di desa Merah Mege.

Saat konflik terjadi di Aceh, masyarakat yang memiliki jadwal wajib jaga malam bertempat di pos ronda dan masyarakat yang tidak berkewajiban jaga wajib perminggu akan melakukan patroli atau berkeliling desa untuk mengamankan Desa Merah Mege

Bagi masyarakat yang tidak mengikuti arahan untuk berjaga pada malam hari, maka aparat keamanan dari TNI akan memberikan hukuman seperti *push up* atau dimasukkan ke dalam sebuah drum atau bak yang berisikan air. Hukuman berupa mandi malam yang dibasahkan sekaligus dengan pakaiannya dan diharuskan menghabiskan satu sabun batang untuk memandikan tubuhnya ini dianggap terlalu memberatkan masyarakat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keadaan iklim di Desa Merah Mege yang cukup dingin. Apalagi setelah dimandikan itu masyarakat tetap diminta untuk melakukan penjagaan tanpa mengganti pakaiannya. Sehingga sangat wajar bagi masyarakat transmigran yang malah takut dengan aparat keamanan.

Dua langkah strategi adaptasi masyarakat transmigrasi berupa jaga wajib dan jaga masal pada masa konflik dianggap belum cukup untuk mengamankan wilayahnya. Untuk itu masyarakat melakukan strategi lain yang digunakan saat kondisi darurat diberlakukan. Kondisi darurat adalah saat terjadinya pembakaran, penculikan atau pembunuhan di sekitar Desa Merah Mege, maka langkah yang ditempuh masyarakat untuk beradaptasi pada saat darurat adalah dengan cara berjaga secara diam-diam atau bersiaga dengan bersembunyi di bawah pohon kopi.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Pelly bahwa misi budaya dan latar budaya serta perubahan dalam masyarakat tuan rumah membawa pengaruh terhadap strategi adaptasi perantau dan struktur sosialnya (Pelly, 1994:4). Adanya konflik antara kelompok Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia memberikan perubahan secara politik serta keamanan di Aceh. Hal ini menyebabkan masyarakat transmigrasi mengubah strategi adaptasi mereka. Awalnya hanya ada penjagaan rutin yang terjadwal setiap minggunya, kemudian ditambah dengan penjagaan pada setiap malam dengan berkeliling kampung. Terakhir perubahan strategi yang dilakukan masyarakat transmigrasi adalah pada saat darurat, masyarakat transmigrasi terpaksa harus bersembunyi di bawah pohon kopi untuk mengamati keamanan di lingkungan Desa Merah Mege.

Kelompok penjagaan di malam hari ini merupakan peran yang sangat penting dalam mengadaptasikan misi budaya masyarakat Jawa terhadap tuntutan konflik Aceh yang sedang terjadi di wilayah transmigran. Perubahan masyarakat transmigrasi setelah berakhirnya konflik Aceh di Desa Merah Mege adalah tidak lagi melakukan penjagaan malam, baik itu jaga rutin ataupun jaga masal, karena masyarakat sudah percaya sepenuhnya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan perihal keamanan di desa tersebut.

2. Kepemilikan Senjata Tajam dan Senjata Rakitan

Kepemilikan senjata tajam oleh masyarakat transmigrasi merupakan arahan dari TNI dan Polri, hal ini menunjukkan kepatuhan masyarakat dalam menjaga keamanan di Desa Merah Mege. Berbeda dengan senjata tajam yang diarahkan oleh TNI dan Polri, kepemilikan senjata rakitan ini berdasarkan pada inisiatif masyarakat transmigrasi sendiri. Masyarakat yang membawa senjata tajam dan senjata rakitan membuktikan bahwa masyarakat transmigrasi di Desa Merah Mege ini sudah bersiap dengan kemungkinan apapun yang akan terjadi jika seandainya mereka bertemu dengan anggota GAM.

Senjata tajam yang digunakan masyarakat adalah parang, tombak, linggis dan pedang. Senjata rakitan yang dimiliki masyarakat transmigrasi dibuat sendiri oleh masyarakat transmigrasi tersebut yang jika ada yang berminat akan dijual dengan harga mulai dari Rp. 250.000 sampai Rp. 500.000. Harga yang ditawarkan untuk senjata rakitan pada saat itu terbilang cukup mahal, sehingga hanya masyarakat tertentu saja yang memilikinya.

Kepemilikan senjata rakitan itu kemudian menimbulkan rumor bahwa masyarakat di Desa Merah Mege memiliki perkumpulan secara terorganisir untuk melawan anggota GAM. Tetapi hal tersebut tidaklah benar karena kepemilikan senjata rakitan tersebut tidak diorganisir untuk melawan GAM, tetapi terorganisir sendiri untuk menjaga wilayah desa Merah Mege.

Meskipun tidak semua masyarakat memiliki atau mengetahui tentang kepemilikan senjata rakitan, Reje atau kepala Desa Merah Mege tetap mengawasi atau mencatat siapa saja masyarakatnya yang memiliki senjata rakitan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Tetapi dengan rumor yang beredar bahwa masyarakat di desa Merah Mege ini memiliki suatu perkumpulan atau organisasi seperti milisi yang terstruktur untuk melawan GAM, memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat, karena masyarakat di desa merah Mege merasa bahwa keberadaan rumor perihal milisi tersebut membuat mereka menjadi diperhitungkan oleh GAM, seolah-olah mendapatkan kekuatan yang tidak bisa disepelekan begitu saja oleh anggota GAM. Meskipun dalam kenyataannya milisi yang dirumorkan tersebut tidak bisa dibuktikan.

Setelah penandatanganan perdamaian tahun 2005, masyarakat diharuskan menyerahkan segala jenis senjata rakitan serta amunisinya untuk keamanan bersama dan menghindari adanya penyalahgunaan oleh masyarakat transmigrasi. Setelah perdamaian semua senjata rakitan dikumpulkan di markas TNI dan dimusnahkan saat itu juga.

3. Merubah Aktivitas Harian Masyarakat Transmigrasi

Aktivitas harian masyarakat transmigrasi di Desa Merah Mege ini terpaksa harus mengalami perubahan setelah adanya GAM di Aceh Tengah, kegiatan yang berubah adalah pengajian rutin setiap malam jumat dan mengurangi durasi dalam melakukan kegiatan berkebun.

Transmigran asal Jawa tetap harus mempertahankan identitas etnik dengan kekuatan solidaritas mereka guna menjalankan misi budaya mereka, yakni dalam bentuk pengajian rutin setiap malam jumat sehabis sholat isya, tetapi masyarakat juga harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan wilayah yang sedang berkonflik. Hasil dari musyawarah masyarakat transmigrasi untuk tetap menjaga solidaritas, misi budaya dan untuk menghindari hukuman dari TNI dan Polri maka masyarakat transmigrasi memutuskan untuk tetap mempertahankan rutinitas pengajian jumat mereka tetapi melakukan perubahan di jadwal pengajian menjadi sehabis asar. Para transmigran terpaksa harus menyesuaikan aktivitas rutin mereka dengan keadaan politik tuan rumah yakni Aceh supaya dapat bertahan dan mengadaptasikan misi budaya mereka.

Selain perubahan pada jadwal pengajian malam, masyarakat juga mengurangi kegiatan berkebun saat terjadinya konflik di Aceh yang awalnya kegiatan berkebun dimulai pukul 08.00-16.00 menjadi pukul 08.00-14.00. Hal ini dilakukan atas arahan dari pihak TNI dan Polri yang tidak menginginkan sesuatu terjadi kepada masyarakat transmigrasi di Desa Merah Mege tersebut. Meskipun masyarakat menyadari bahwa misi budaya mereka dalam

mendapatkan kekayaan dan teritorialnya untuk keturunan mereka belumlah tercapai, namun dengan adanya konflik ini masyarakat harus mampu menahan serta mengadaptasikan strategi yang dianggap mampu untuk bertahan di tengah konflik. Namun, setelah perdamaian tahun 2005, masyarakat memiliki durasi berkebun yang sama seperti sebelum adanya konflik Aceh, yakni hingga pukul 16.00.

4. Berkumpul dalam Satu Rumah yang Sama

Masyarakat transmigrasi bukan saja masyarakat Jawa yang menempati wilayah Aceh karena mengikuti program transmigrasi dari pemerintah Republik Indonesia, tetapi masyarakat transmigrasi dari Jawa juga dipandang sebagai penjajah oleh masyarakat asli Aceh, seperti yang tertera dalam teks proklamasi GAM. Hal ini terjadi karena dominasi dari birokrat Jawa yang telah menyingkirkan elit Aceh dan juga masyarakat transmigrasi yang datang dari pulau Jawa mendapatkan sejumlah bantuan dan tanah di Aceh yang digunakan sebagai lahan pencarian kehidupan mereka.

Asosiasi sukarela yang dimiliki masyarakat Jawa, tidak hanya dilakukan oleh kaum pria dengan penjagaan malam saja, tetapi juga dilakukan oleh perempuan dengan berkumpulnya setiap lima keluarga menjadi satu rumah. Rumah yang dipilih sebagai tempat berlindung adalah rumah aparat desa, rumah orang yang sudah lanjut usia, dan rumah yang dianggap lebih besar daripada yang lainnya. Rumah tersebut ditempati oleh perempuan, orang tua dan anak-anak yang merasakan ketakutan karena adanya suara tembakan yang sering terdengar. Sebagai peran yang sangat penting, asosiasi sukarela yang dilakukan perempuan transmigran Jawa adalah untuk dapat mengadaptasikan misi budaya berupa mempertahankan anak-anak atau keturunannya terhadap tuntutan lingkungan yang sedang berkonflik.

Berkumpulnya masyarakat transmigrasi di dalam satu rumah untuk setiap lima keluarga ini tidak berlangsung lama, karena masyarakat memikirkan kemungkinan lain yang bisa saja terjadi saat masyarakat meninggalkan rumahnya. Kemungkinan yang bisa saja terjadi saat masyarakat transmigrasi pergi meninggalkan rumahnya adalah kemungkinan dibakarnya rumah yang tidak berpenghuni, sehingga masyarakat transmigrasi di Desa Merah Mege tersebut memilih untuk kembali ke rumahnya dengan harapan bisa menjaga harta benda yang dimilikinya.

5. Ketakutan Bertemu dengan Anggota GAM

Masyarakat transmigrasi di Desa Merah Mege mengalami kendala berupa perasaan takut dan was-was mengenai keberlangsungan hidup mereka. Rumor dan berita di televisi yang menceritakan betapa kejamnya anggota GAM terhadap masyarakat, membuat masyarakat

transmigrasi di Desa Merah Mege sangat ketakutan dan terus waspada akan kehadiran anggota GAM.

Masyarakat transmigrasi merasakan ketakutan akan bertemunya mereka dengan salah satu atau kelompok GAM saat melakukan penjagaan malam dan saat berkebun, yang ditakutkan masyarakat transmigrasi di Desa Merah Mege adalah takut dibunuh dan diculik. selain itu masyarakat juga merasa takut ketika rumah yang mereka tinggal saat malam hari akan dibakar oleh anggota GAM. Hal ini terjadi karena masyarakat transmigrasi melihat sendiri beberapa orang yang dibunuh atau diculik dan juga adanya berita dari televisi perihal kekejaman anggota GAM.

6. Ketakutan Akan Hukuman yang Diberikan oleh TNI dan Polri

Masyarakat transmigrasi di Desa Merah Mege merasa ketakutan dengan hukuman yang diberikan oleh TNI dan Polri karena hukuman yang diberikan selain *push up* dianggap tidak seimbang dengan kesalahan masyarakat, namun begitu masyarakat di Desa Merah Mege ini tidak berani mengemukakan pendapatnya, karena jika ada yang melakukan perlawanan ataupun keberatan dengan hukuman yang diberikan TNI dan Polri maka hukuman tersebut bisa saja bertambah.

Hukuman seperti dimandikan dan dipaksa untuk menghabiskan satu sabun batang dianggap hukuman yang tidak baik bagi masyarakat. Hal ini tentunya karena keadaan iklim di Aceh Tengah yang cukup dingin, sehingga hukuman itu dianggap terlalu kejam dan menyiksa masyarakat di Desa Merah Mege.

Beberapa dari masyarakat yang mendapatkan pukulan dari TNI dan Polri karena membantah perintah menjadikan trauma tersendiri bagi masyarakat lainnya. Tujuan TNI dan Polri melakukan hal tersebut adalah sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat lainnya, supaya tidak ada lagi yang melakukan kesalahan yang sama.

7. Ketakutan Akan Suasana Konflik (Suara Tembakan dan Temuan Mayat)

Ketakutan masyarakat tentunya tidak bisa terlepas dari suasana konflik yang mencekam pada saat itu, dimana masyarakat terus mendengar suara tembakan dan melihat beberapa temuan mayat. Hal ini tentunya sangat mengganggu kesehatan mental masyarakat transmigrasi di Desa Merah Mege.

Namun demikian, ketakutan ini tidak menjadikan masyarakat transmigrasi di Desa Merah Mege kembali ke kampung halaman mereka, karena mereka harus meninggalkan rumah serta lahan perkebunan yang menjadi mata pencaharian mereka. Jika masyarakat trans-

migrasi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, tidak ada jaminan juga bagi mereka untuk dapat bertahan hidup karena sulitnya mencari pekerjaan di daerah asal.

8. *Terkendala dalam Melakukan Pekerjaan Berkebun dan Kegiatan Sehari-hari*

Saat melakukan pekerjaan berkebun sebagai upaya untuk mewujudkan misi budayanya, masyarakat transmigrasi tidak bisa melakukan kegiatan tersebut seperti sebelum adanya konflik Aceh, hal ini karena adanya pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh aparat keamanan yakni TNI dan Polri. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan masyarakat bertemu dengan anggota GAM, supaya tidak adaya korban jiwa lagi.

Mayarakat memilih untuk menaati peraturan yang diminta oleh anggota TNI dan Polri adalah karena masyarakat tidak ingin mendapatkan hukuman dari TNI dan Polri, dan bagi mereka juga masih merasakan ketakutan yang mendalam terhadap anggota GAM yang masih berada di sekitaran Aceh Tengah. Masyarakat di Desa Merah Mege ini terpaksa harus menunggu sampai keadaan benar-benar aman untuk kembali melaksanakan misi budaya mereka dalam memperluas teritorial mereka dan juga mengumpulkan harta benda untuk keturunannya.

Meskipun adanya pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan misi budaya mereka, masyarakat transmigrasi mencoba untuk membiasakan hal tersebut guna tercapainya keamanan bagi keberlangsungan hidup mereka.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat transmigrasi di Desa Merah Mege memiliki apa yang disebut dengan misi budaya yang membuat mereka tetap bertahan di daerah yang sedang mengalami konflik, dan dalam beradaptasi pada masa konflik Aceh, masyarakat melakukan strategi adaptasi sebagai berikut: melakukan penjagaan bersama pada malam hari, kepemilikan senjata tajam dan rakitan, merubah aktivitas harian masyarakat transmigrasi, serta berkumpul dalam satu rumah yang sama untuk setiap lima keluarga. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat transmigrasi adalah perasaan takut dan khawatir saat berkerja karena takut bertemu dengan GAM, ketakutan akan hukuman dari TNI, ketakutan saat mendengar suara tembakan dan melihat mayat yang dibunuh oleh TNI dan GAM serta terkendalanya masyarakat transmigrasi dalam melakukan pekerjaan berkebun dan kegiatan sehari-hari.

SARAN

Bagi pemerintah untuk dapat lebih menyamaratakan perhatian dan bantuannya kepada setiap wilayah supaya mengurangi kecemburuan yang akan mengakibatkan konflik dan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat. Bagi masyarakat transmigran Jawa supaya dapat me-

wariskan misi budaya yang diperjuangkan semasa konflik kepada keturunannya untuk dapat terus melestarikan misi budaya tersebut sebagai identitas etnik mereka. Bagi masyarakat transmigran Jawa yang tinggal di Desa Merah Mege supaya tetap menjaga solidaritas dengan sesama masyarakat perantau lainnya, baik yang satu suku maupun yang berbeda untuk tetap mempertahankan wilayah yang sudah dijaga selama ini.

DAFTAR PUSAKA

Haviland A. William. 1985. *Antropologi*. Jakarta: Erlangga.

Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Skripsi

Jayanti, Kurnia. 2010. “Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Sejak Tahun 1976 sampai 2005”. Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora. Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Suprianto, Dani Hendrawan. 2012. “Adaptasi Sosial Pengungsi Erupsi Gunung Merapi di Hunian Sementara (Huntara) Jenggala Dusun Plosokerep Desa Umbulharjo Kec. Cangkringan Kab. Sleman. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan Pendidikan Sosiologi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Dokumen

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian. Lembaran RI Tahun 2009 No. 29. Jakarta: Sekretariat Negara.